

# Pendekatan *Inferential Judgement* Dalam *Minimum Essential Force* TNI Angkatan Laut

Oleh: Umar Abubakar

## 1. Pendahuluan

Akibat banyaknya faktor yang tak dapat diukur (*intangibles*) dalam menghitung jumlah kebutuhan kapal TNI Angkatan Laut, terlebih lagi dengan adanya kriteria *minimum essential force*, maka dibutuhkan suatu pendekatan tersendiri untuk menghitung jumlah kebutuhan tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah *inferential judgement* dalam setiap tahapan proses perhitungan. *Inferential judgement* adalah suatu kesimpulan yang diharapkan untuk terjadi atau benar berdasarkan berbagai kejadian/informasi sebelumnya.

Nilai-nilai filosofis, strategi maupun tujuan (*goals*) merupakan dasar berpikir yang mempengaruhi suatu *inferential judgement*. Bentuk nyata dari suatu *inferential judgement* adalah berupa asumsi yang diadopsi untuk meneruskan suatu proses pembahasan/perhitungan lebih lanjut.

## 2. Menetapkan Representasi

### Kapasitas *Minimum Essential Force*

Tahapan paling awal yang harus dilakukan adalah menetapkan *minimum essential force* yang dipersepsikan tersebut akan merepresentasikan kapasitas apa. Apakah *minimum essential force* adalah representasi dari kapasitas *outward looking approach*, sehingga misalnya, kegiatan kehadiran di laut utamanya adalah ditujukan untuk tujuan penangkalan dengan kemampuan me-

laksanakan *second strike* untuk kontra *pre-emptive strike* dan bukan hanya sekedar "hadir" di laut. Ataukah *minimum essential force* adalah representasi dari kapasitas *inward looking approach*, sehingga misalnya, kehadiran di laut utamanya ditujukan dalam rangka menjaga *internal maritime security*, sambil menyiapkan diri untuk pada waktu yang tepat membangun kapasitas yang bersifat *outward looking approach*.

Terdapat setidaknya tiga realitas yang sulit guna mendukung *minimum essential force* yang diinginkan untuk dipersepsikan sebagai representasi dari *outward looking approach*:

1. Keterbatasan anggaran negara untuk mendukung pembangunan kekuatan, sehingga prioritas negara masih pada aspek pembangunan ekonomi. Sedangkan untuk membangun kapasitas yang bersifat *outward looking approach* membutuhkan sumber dana yang cukup besar.

2. Dari berbagai hasil pengkajian lingkungan strategis yang ada, lingkup regional maupun global, tidak menunjukkan adanya kecenderungan akan adanya suatu negara yang akan menyerang Indonesia dalam waktu dekat (*in the near future*). Sedangkan yang mungkin terjadi adalah semacam kasus Ambalat walaupun probabilitasnya mungkin semakin mengecil.

3. Bila tetap bertumpu pada *outward looking approach*, maka akan ditemui kesulitan untuk menerapkan *minimum essential force* terhadap ancaman dari negara yang mana dan dalam *scale of war* yang bagaimana. Karena untuk negara tertentu, kekuatan yang ada sekarang pun dapat saja dianggap sudah maksimal.

Oleh sebab itu, *minimum essential force* yang dipersepsikan seyogianya merupakan representasi dari kapasitas *inward looking approach*. Yaitu suatu *minimum essential force* yang utamanya ditujukan dalam rangka menjaga *internal maritime security*, sambil menyiapkan diri untuk pada waktu yang tepat membangun kapasitas yang bersifat *outward looking approach*. Selanjutnya, secara tak tertulis, pengertian inilah yang melatarbelakangi Tugas Pokok yang dijalankan TNI Angkatan Laut.

## 3. Memilih Kegiatan Minimal

Tahapan selanjutnya adalah memilih kegiatan minimal yang harus dilaksanakan sesuai Tugas Pokok TNI Angkatan Laut. Hal tersebut dilakukan dengan menerjemahkan Tugas Pokok dari format pernyataan-pernyataan yang bersifat normatif menjadi berbagai kegiatan yang dapat diukur. Kegiatan-kegiatan minimal namun esensial yang diperoleh dari hasil terjemahan itu pada

gilirannya memerlukan sejumlah kapal untuk melaksanakannya. Jumlah kapal tersebut adalah merupakan *minimum essential force* yang dimaksud.

Secara tertulis Tugas Pokok TNI Angkatan Laut adalah:

1. Menyiapkan dan membina kekuatan untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi kepentingan nasional di laut yurisdiksi nasional.
2. Menegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan nasional dan hukum internasional.
3. Melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas-tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Untuk butir 1 kegiatan Latihan Gabungan TNI diasumsikan merupakan tolok ukur optimal untuk memenuhi tugas dalam butir tersebut. Mengingat *minimum essential force* yang dipersiapkan adalah representasi dari *inward looking approach* dan bukan *outward looking approach*, maka kekuatan TNI Angkatan Laut yang dilibatkan dalam Latihan Gabungan TNI terakhir adalah kekuatan minimal yang harus dipertahankan untuk pelaksanaan butir.

Asumsi berikutnya adalah tugas pokok butir 2 akan terlaksana bila tugas pokok butir 3 dapat terlaksana. Selanjutnya diasumsikan bahwa tugas pokok butir 3 akan terlaksana bila tugas operasi militer selain perang dapat dilaksanakan. Tugas operasi militer selain perang ditambah dengan tugas mengikuti Latgab TNI inilah tugas minimal yang harus dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut.

Selanjutnya, kedua macam tugas tersebut dapat dikelompokkan dalam

dua macam jenis operasi. Jenis Operasi Tipe I adalah operasi fungsi konstabulari (*constabulary task*) dalam rangka menjaga *internal maritime security*. Pada hakekatnya operasi ini dilaksanakan selama 24 jam secara non stop sepanjang tahun pada kawasan perairan tertentu. Sedangkan jenis Operasi Tipe II adalah operasi yang di luar jenis Operasi Tipe I, yang tujuannya untuk tetap mempersiapkan diri mengembangkan kekuatan sesuai *outward looking approach*. Lokasinya dapat berlangsung di seluruh perairan Indonesia dan kegiatannya tidak harus dilaksanakan sepanjang tahun.

Jenis Operasi Tipe I adalah operasi-operasi anti teror, anti pembajakan, anti penyeludupan, anti *illegal fishing*, anti *illegal logging* dan lain sebagainya. Sedangkan jenis Operasi Tipe II adalah operasi untuk memindahkan/mendaratkan pasukan dari satu pulau ke pulau lainnya, operasi Latihan Gabungan TNI, operasi patroli pulau-pulau terluar rawan konflik, operasi kehadiran di laut, operasi latihan bersama negara lain, operasi sosial dan lain-lain.

#### 4. Menghitung Kebutuhan Kapal Untuk Jenis Operasi Tipe I

Sebagai langkah awal dari proses perhitungan adalah memilih daerah yang membutuhkan untuk jenis operasi ini. Pemilihan daerah jenis Operasi Tipe I ditentukan berdasarkan atas riwayat kejadian masa lalu serta potensi kejadian di masa mendatang. Data-data frekuensi kejadian di masa lalu seperti kegiatan pembajakan, terorisme, penyelundupan, *illegal fishing*, *illegal logging* maupun potensi pembajakan kapal tanker (seperti halnya di Somalia), dapat digunakan untuk menetapkan daerah perairan operasi. Misalnya akan diperoleh perairan Selat Malaka, perairan Laut Cina Selatan, perairan Selat Makasar, perairan Laut Banda dan sekitarnya.

Selanjutnya, luas blok pada masing-masing perairan yang akan dipatroli selama 24 jam dan sepanjang tahun, dapat ditetapkan dan diukur luasnya. Luas blok, karakteristik perairan serta intensitas kejadian yang diharapkan merupakan dasar perhitungan untuk menghitung jumlah dan jenis kapal yang dibutuhkan untuk setiap blok. Untuk meningkatkan efektifitas operasi, unsur-unsur *on board helicopter*, *land based patrol aircraft* serta kapal logistik mobil kiranya perlu dimasukkan pula. Dengan pola penggunaan kekuatan, misalnya 1/3 operasi, 1/3 siaga dan 1/3 pemeliharaan dan perbaikan, maka penggunaan kapal per tahun untuk seluruh perairan wilayah operasi adalah *minimum essential force* yang dibutuhkan untuk jenis Operasi I.

#### 5. Menghitung Kebutuhan Kapal Untuk Jenis Operasi Tipe II

Jenis Operasi II adalah operasi di luar jenis Operasi I. Termasuk dalam jenis operasi ini adalah operasi untuk memindahkan/mendaratkan pasukan dari satu pulau ke pulau lainnya, operasi Latgab TNI, operasi patroli pulau-pulau terluar rawan konflik, operasi kehadiran di laut, operasi latihan bersama negara lain, operasi sosial dan lain-lain. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu pendekatan *inferential judgement* murni.

Misalnya, seluruh kapal TNI Angkatan Laut yang mengikuti operasi Latgab TNI berhasil, maka sebagai contoh diasumsikan 60 persen operasi lainnya dalam lingkup jenis Operasi II akan dapat terlaksana pula. Angka 60 persen adalah angka pendekatan kategori *fair*, sedangkan pendekatan kategori lainnya adalah bersifat pesimistik (kurang dari 60 persen) atau optimistik (lebih besar dari 60 persen).

Bila menggunakan kriteria *minimum essential force*, pendekatan yang diambil adalah kategori optimistik. Namun se-

## Pendekatan *Inferential Judgement* Dalam *Minimum Essential Force* TNI AL

baiknya, angka pendekatan yang akan digunakan tergantung dari *assessment* dari realitas yang ada di lapangan. Pada waktu Operasi Latgab 2008 yang lalu telah digunakan kapal perang sebanyak 34 buah dari berbagai jenis. Sehingga bila menggunakan pendekatan kategori *fair*, maka seluruh operasi dalam lingkup jenis Operasi II akan membutuhkan

$100/60 \times 34 = 57$  kapal.

### 6. Penutup

Jumlah kebutuhan kapal *minimum essential force* yang dicari adalah jumlah kebutuhan kapal Jenis Operasi I ditambah jumlah kebutuhan kapal Jenis Operasi II (57 kapal). Dalam menggunakan pendekatan *inferential*

*judgement*, tidak dapat dihindarkan bahwa akan terdapat perbedaan hasil perhitungan bila dilakukan oleh individu yang berbeda. Hal tersebut dapat terjadi mengingat tetap adanya faktor-faktor subyektif yang terlibat dalam keseluruhan proses perhitungan yang dilakukan.



#### Referensi:

<http://www.tnial.mil.id/Postur/TugasPokok/tabid/55/Default.aspx>  
<http://www.globalsecurity.org/military/ops/sea.htm>  
<http://a1140310.uscgaux.info/id28.htm>

#### Tentang Penulis:

**Robert Mangindaan** adalah Laksda TNI (Purn), alumni AAL-XIV, pengalaman penugasan di antaranya sebagai Naval Attache pada KBRI Manila, Filipina (1988-1991), BAIS ABRI (1991-1996) dan Penasehat Militer pada PTRI untuk PBB, New York, (1996-1999). Kini menjabat sebagai Ketua FKPM dan Tenaga Profesional Tetap di Lemhannas, Jakarta.

**Budiman Djoko Said** adalah Laksda TNI (Purn), alumni AAL-XV, mantan Komandan Seskoal (2000-2001). Kini menjabat Wakil Ketua FKPM dan Rektor UPN Veteran, Jakarta.

**Umar Abubakar** adalah Kolonel Laut (Purn), alumni AAL-XIV, meraih gelar insinyur di STTAL Surabaya dan S-2 di ITB Bandung, alumni Seskoal Dikreg XXIV dan pemegang MSc dari U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, California pada bidang *Management Science*. Terakhir bertugas di Dinas Pendidikan TNI-AL.

**Alman Helvas Ali** adalah analis di FKPM. Aktif menulis di beberapa majalah dan surat kabar dengan spesialisasi isu kekuatan laut dan keamanan maritim.